



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH

KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2023

INSPEKTORAT KOTA PEKALONGAN

Jalan Mataram Nomor 1 Telepon/Fax. 0285-421042

e-mail : Inspektorat.kotapkl@gmail.com



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
INSPEKTORAT DAERAH

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 700/010 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

INSPEKTUR DAERAH KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun sekaligus merupakan komitmen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diterbitkan Keputusan Inspektur Kota Pekalongan tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang –

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – kota Besar dan Kota – kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PEKALONGAN
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

Pasal 1

- (1) Dalam Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;
- (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021-2026.

Pasal 2

Sistematika RENJA Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, meliputi :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
- BAB V : PENUTUP.

Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 03 Agustus 2022.

INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKALONGAN



NUR PRIYANTOMO, SE., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196903101996031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Pekalongan, Juli 2023

INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKALONGAN



NUR PRIYANTOMO, SE., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196903101996031002

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel.T- C.29)	 11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel.T- C.30) ..	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31) .	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel.T-C.32)	22
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	 24
2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023	24
2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 (Tabel.T-C.33) ...	24
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 30
 BAB V. PENUTUP.....	 30

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) Kota Pekalongan.	12
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan ..	12
Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Pekalongan.	12
Tabel T-C.32 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Pekalongan..	12
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Pekalongan	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja di tahun yang akan datang, maka perlu segera menetapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 yang memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan dana indikatif serta sumber dananya.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Pekalongan yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan pada akhir tahun anggaran. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan

indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatarbelakangi penyusunan renja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);
 13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor XX Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023, adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kota

- Pekalongan dalam menentukan prioritas program/kegiatan dan kebijakan anggaran tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
 3. Pedoman Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Tahun 2023;
 4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
 5. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah dan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Inspektorat Daerah Kota Pekalongan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
Kota Pekalongan

3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berdasarkan pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan yang disajikan dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan, maka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, dilakukan evaluasi dan analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja kegiatan, agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dalam rangka perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Pekalongan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 terlampir pada tabel berikut :

(Tabel T- C. 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Pekalongan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Indikator	SATUAN	Target Akhir Renstra	Tahun 2021		Realisasi Capaian	Persentase Capaian target	status capaian
					Target 2021	Realisasi 2021			
1	2	3	5		4	11	12	12	12
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat								
1.00	URUSAN UMUM								
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	100	100	Tercapai
201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	Tercapai
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	Tercapai

01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	0	-	-	-	Tercapai
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	Tercapai
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	Tercapai
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	Tercapai
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85	85	85	85	85	Tercapai
201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	persen	100	100	100	100	100	Tercapai
01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
04	Reviu Laporan Keuangan								
06	Kerjasama Pengawasan Internal								
07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								

202	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	persen	100	100	100	100	100	Tercapai
01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah								
03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	nilai	3	3	3	3	3	Tercapai
201	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	persen	100	100	100	100	100	Tercapai
01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								
202	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	persen	98	93	93	93	93	Tercapai
03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi								
04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Analisis efisiensi dan efektivitas pengukuran kinerja setiap indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun **2021 – 2026** yang menunjukkan peran utama dan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam mendukung tercapaainya Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius”**.

Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dilakukan dan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi, serta penentuan penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Hasil Analisis Efisiensi dan Efektifitas, serta *Performance Gap* dan Strategi Pemecahan Masalah Pencapaian Kinerja setiap Sasaran Inspektorat Daerah Kota Pekalongan :

1. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi”

Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) BPKP atas Self Assessment (SA) Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan pada bulan Desember 2019, bahwa Level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sudah mencapai Level 3 Penuh, menunjukkan bahwa kinerja sasaran “Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan” telah melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019, yaitu Level 3 DC. Untuk tahun 2020 dan 2021 belum ada pengusulan penilaian kapabilitas APIP karena masih



menunggu instruksi dari BPKP.

Keberhasilan pencapaian target sasaran meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan yaitu dengan melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP serta melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri guna mengembangkan kompetensi APIP. Selain itu, BPKP senantiasa memberikan dukungan, bantuan teknis dalam membangun/menyusun infrastruktur yang harus dibangun dan dipenuhi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan untuk mencapai tahapan target peningkatan kapabilitas APIP level 5.

Dampak dari terlampauinya Target Persentase Capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilitas APIP, yaitu hasil Quality Assurance (QA) BPKP Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan pada tahun 2019 telah berhasil mencapai Level Kapabilitas APIP level 3 dari 5 level kapabilitas APIP. Tercapainya target kapabilitas APIP Level 3 tersebut, merupakan keberhasilan upaya terstruktur Pemerintah Kota Pekalongan untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Peluang-peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara baik guna meningkatkan kualitas layanan antara lain dengan membuat kesepahaman bersama dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap OPD serta dalam bentuk konsultansi-konsultansi teknis auditing dan implementasi peraturan, serta *transfer knowledge* dalam pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD dan pelaksanaan audit operasional terhadap BUMD/OPD serta melakukan pemeriksaan bersama (*join audit*) atas permintaan dan kebijakan



Pemerintah Kota Pekalongan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan Sasaran dengan indikator kinerja Level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan pada level 3, adalah:

- a) Kurangnya anggaran untuk peningkatan keterampilan auditor yang ada saat ini melalui pendidikan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan pelatihan teknis audit lainnya.
- b) Kurangnya sumber daya aparatur berupa auditor dengan keterampilan teknis khusus seperti teknik sipil, arsitektur dan akuntansi serta sarana prasarana yang tersedia.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas dilakukan untuk mencapai tingkat berikutnya terkait perwujudan peran APIP yang efektif yaitu melalui :

- a) Membuat usulan untuk meningkatkan kompetensi SDM APIP melalui pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan substantif lainnya.
- b) Membuat usulan penambahan SDM pengawas dan aparat pengawas berdasarkan Analisis Kebutuhan SDM Pengawas.

a. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi bertujuan untuk membangun budaya anti korupsi kepada seluruh pegawai serta mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, melalui beberapa kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi, sebagai upaya pencegahan korupsi secara bertahap dan berkelanjutan untuk membangun budaya anti korupsi yang tidak dapat diperoleh secara instan dalam satu atau dua kali penyelenggaraan.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Pekalongan telah



melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment).

Hasil penilaian atas fakta objektif terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE, agar dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Dampak dari pelaksanaan program, Hasil Penilaian dan Evaluasi atas PMPRB on-line tahun 2021 dengan hasil penilaian Indeks RB Kota Pekalongan mencapai 69,66 dengan kategori B. Upaya peningkatan integritas telah dilakukan dengan membangun 1 Unit Kerja menuju ZI WBK, namun belum berhasil mendapatkan predikat WBK yang dimaksud.

Hasil Verifikasi KPK Tahun 2021 atas Progres MCP (Monitoring Centre Monitoring Centre for Prevention) Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 85,70% (Ranking 27 Tingkat Provinsi Jawa Tengah).

Pencapaian target indikator kinerja Tingkat Maturitas implementasi SPIP pada dengan skor 2,812 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan disebabkan adanya integrasi dalam penilaian maturitas SPIP.

2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Upaya mewujudkan capaian kinerja sasaran dengan melaksanakan program utama yang mendukung sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” tahun 2021, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota



Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebesar 73,16 dengan kategori BB (sangat baik). Disamping hal tersebut, juga didukung upaya dan fasilitas kerja berupa :

- 1) Meningkatkan kompetensi SDM Perencana dan Pelaksana Program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pada kegiatan BinteK/Diklat Perencanaan Program maupun workshop pengelolaan aplikasi SAKIP Kota Pekalongan,
 - 2) Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis dan melaksanakan tindak lanjut hasil reviu dengan penetapan indikator tujuan dan sasaran, perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama, menyelaraskan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra maupun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD.
 - 3) Tersedianya aplikasi SIMRAL berbasis web yang menunjang kegiatan pengelolaan data kinerja dan kegiatan monitoring / evaluasi dan pelaporan pencapaian target (kinerja) secara berkala.
3. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah” melalui program penyelenggaraan pengawasan

Program penyelenggaraan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Program tersebut didukung kegiatan : Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Pemutakhiran data dan informasi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Pengembangan Simwas) dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.

Indikator Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut



Hasil Pemeriksaan APF yaitu Persentase penyelesaian TLHP Inspektorat Kota sampai dengan tahun 2021 yaitu sebesar 99,3%. Tindak lanjut dari rekomendasi yang belum sesuai yaitu sebesar 1,4%. Untuk penyelesaian TLRHP Inspektorat Provinsi sudah 100%. Presentase penyelesaian TLRHP atas pemeriksaan BPK di semester II tahun 2021 sebesar 86,5%.

Sedangkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran strategis pada tahun 2022 adalah :

- a. Efektifitas pengendalian intern belum maksimal, karena belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasi
- b. Belum ada OPD yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada enam area perubahan yang ditetapkan dengan Predikat WBK karena Hasil survey persepsi korupsinya masih dibawah standar.
- c. Kurangnya komitmen untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun secara tepat waktu, yang mempengaruhi kinerja anggaran dan kualitas hasil kegiatan.
- d. Belum ada pemberian *reward and punishment* berdasarkan evaluasi kinerja internal yang memadai.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah :

- a. Untuk mencapai tingkat maturitas optimum, harus mendorong dan memfasilitasi OPD untuk menyelenggarakan SPIP sesuai dengan ketentuan yang ada, antara lain memfasilitasi dan membina OPD dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian serta melakukan evaluasi setiap semester dengan melakukan



pemantauan yang berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik, selanjutnya dilakukan penyesuaian kode etik atas perubahan lingkungan strategis yang terjadi dan ada pemantauan otomatis/online atas penerapan kode etik tersebut.

- b. Dalam upaya untuk meyakinkan bahwa sistem pengendalian intern bekerja secara efektif, Inspektorat Daerah Kota Pekalongan perlu melakukan pengawasan intern dengan melakukan kegiatan evaluasi terpisah atas penyelenggaraan SPIP di SKPD, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern.
- c. Perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas, serta memperbaiki kualitas hasil survey dengan meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik.
- d. Menerapkan manajemen kinerja berupa Budaya Kerja, Efektifitas Kinerja, Efisiensi Anggaran, Sumber Daya Manusia, Tatalaksana, dan Organisasi, yang akan menghasilkan antara lain : Setiap individu sudah secara otomatis bertanggung jawab atas pencapaian target kinerjanya sesuai rencana/tepat waktu dan memiliki ukuran dan target kinerja sebagai dasar reward and punishment.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tidak dapat lepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan



- mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.
2. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2020 berada pada Level 3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional.
 3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 4. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang menggembirakan.
 5. Pembinaan aparatur perangkat daerah yang berintegritas dan anti korupsi untuk melaksanakan reformasi di segala bidang.
 6. Pengembangan teknik dan sistem pengawasan dalam menunjang proses kegiatan Inspektorat Daerah Daerah.
 7. Pengawasan terhadap PPRG secara keseluruhan merupakan upaya penguatan pelaksanaan dan pelebagaan PPRG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah sebagai institusi yang memiliki peran melakukan pengawasan.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kota Pekalongan

RKPD 2023

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET / PAGU	
			TH. 2023	
			TARGET	PAGU
06.01	INSPEKTORAT DAERAH			407,903,000
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			112,816,000



	Indikator Program :Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85	112,816,000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			98,888,000
	Indikator Kegiatan : Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	persen	100	98,888,000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			10,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang terbit tepat waktu	laporan	64	10,000,000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			10,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang terbit tepat waktu	laporan	35	10,000,000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja			10,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang Terbit Tepat Waktu	Laporan	99	10,000,000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan			10,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang Terbit Tepat Waktu	laporan	40	10,000,000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal			8,888,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	laporan	2	8,888,000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			50,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	laporan	7	50,000,000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			13,928,000



	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	persen	100	13,928,000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			6,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Persentase Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan Tepat Waktu	persen	100	6,000,000
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			7,928,000
	Indikator Sub Kegiatan : Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Terbit Tepat Waktu	persen	100	7,928,000
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			295,087,000
	Indikator Program :Level Kapabilitas APIP	nilai	3	295,087,000
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			31,850,000
	Indikator Kegiatan : Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	persen	100	31,850,000
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			28,850,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Peraturan/Pedoman/SOP tentang Peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun	laporan	1	7,850,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen kebijakan/regulasi tentang Pengawasan (PKPT/Jakwas) yang disusun	dokumen	3	7,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	laporan	2	7,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Dokumen RAD PPK yang disusun	laporan	1	7,000,000



6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan			3,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	laporan	7	3,000,000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			263,237,000
	Indikator Kegiatan : Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	persen	95	263,237,000
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			10,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	17	10,000,000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			128,237,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	8	118,237,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen LHKASN	Dokumen	2500	5,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen LHKPN ASN	Dokumen	500	5,000,000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			125,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas yang disusun	Laporan	5	125,000,000
X.XX	Non Urusan			5,235,902,000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,235,902,000
	Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	4,835,769,000



X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12,999,000
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	12,999,000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1,999,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	dokumen	2	1,999,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun	dokumen	0	0
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1,500,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	dokumen	2	1,500,000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,500,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	dokumen	4	2,500,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen	2	2,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	12	2,500,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	5	2,500,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,822,770,000
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	4,822,770,000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4,788,270,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	4,788,270,000



X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			33,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	33,000,000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,500,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	1	1,500,000
	Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	265,743,000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8,821,000
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	8,821,000
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			1,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik	kali	2	1,000,000
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan PAK tenaga fungsional	laporan	2	1,000,000
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			6,821,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri yang disusun	laporan	5	6,821,000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			197,497,000
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	197,497,000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2,500,000



	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	2,500,000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			39,297,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	9,297,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	25	30,000,000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	bulan	12	7,000,000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			40,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	40,000,000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			6,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	12	6,000,000
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2,700,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan	bulan	12	2,700,000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	kali	150	100,000,000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			59,425,000
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	59,425,000



X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4,500,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	4,500,000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			33,925,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	33,925,000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			21,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan	12	21,000,000
	Indikator Program : Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	134,390,000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			134,390,000
	Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	134,390,000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			70,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	16	70,000,000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			34,390,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	1	34,390,000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30,000,000
	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	30,000,000



2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kota Pekalongan.

Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

Tabel T.C-32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas ke-6 yaitu Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat Daerah yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, maka terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan maka mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan regulasi daerah.
3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas demokrasi, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.
5. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang memang harus disebarluaskan kepada masyarakat.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah



Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Inspektorat untuk mendukung prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan).

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Setiap Perangkat Daerah bersama-sama melakukan optimalisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota Pekalongan Periode Tahun 2021-2026, oleh karena itu Renstra Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mengadopsi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius”**.

Sedangkan Misi yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Pekalongan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mengawasi jalannya pelaksanaan Pemerintahan Daerah, adalah Misi Ke-7 Pemerintah Kota Pekalongan yaitu :**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan prinsip prinsip Good Governance dan Clean Goverment”**.

Penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan, didasarkan pada kriteria khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai



(attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound) serta dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan dan isu utama bidang Pengawasan di Kota Pekalongan.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Formulasi : Kumulatif angka tertimbang komponen
Penilaian Kualitas Pelayanan Inspektorat

Sasaran :

1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran 1.1. : _____

a. Nilai SAKIP OPD

Formulasi : Meningkatnya Nilai hasil akhir SAKIP OPD

2. Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

Indikator Tujuan : Maturitas SPIP

Formulasi : Nilai hasil akhir dari penjumlahan angka
tertimbang dari unsur-unsur penilaian SPIP

Sasaran :

1.1. Meningkatnya OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi.

Indikator Sasaran 1.1. : _____

a. Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi

Formulasi : Meningkatnya Jumlah OPD yang telah
menerapkan SPIP pada level terdefinisi

Indikator Tujuan : Jumlah OPD yang Menyandang Predikat
WBK/WBBM



Formulasi : Jumlah OPD yang hasil evaluasinya memenuhi kriteria WBK dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100%.

Sasaran :

1.2. Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran 1.2. :

a. Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM

Formulasi : Jumlah OPD yang hasil evaluasinya memenuhi kriteria WBK dibagi jumlah seluruh OPD dikalikan 100%.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Sehingga ditentukan indikator kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:



RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Pekalongan

Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting			
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Pagu	Sumber Dana		Target	Satuan	Kebutuhan Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat										
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					5,884,152,000					6,620,000,000
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Pekalongan	100	persen	5,426,159,000			100	persen	6,112,500,000
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pekalongan	100	persen	16,000,000	DAU		100	persen	18,000,000
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	Pekalongan	2	dokumen	2,500,000	DAU		2	dokumen	3,000,000
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Pekalongan	2	dokumen	1,500,000	DAU		2	dokumen	3,000,000
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Pekalongan	12	bulan	12,000,000	DAU		12	bulan	12,000,000
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	Pekalongan	4	dokumen		DAU		4	dokumen	
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	Pekalongan	2	dokumen		DAU		2	dokumen	
		Jumlah Dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan	Pekalongan	5	dokumen		DAU		5	dokumen	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

		RTP) yang disusun									
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Pekalongan	100	persen	5,000,070,000	DAU		100	persen	5,535,000,000
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pekalongan	12	bulan	4,965,570,000	DAU	Kekurangan Pagu 348,908,033	12	bulan	5,500,000,000
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Pekalongan	12	bulan	33,000,000	DAU		12	bulan	33,000,000
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Pekalongan	1	dokumen	1,500,000	DAU		1	dokumen	2,000,000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pekalongan	100	persen	40,500,000	DAU		100	persen	61,500,000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	Pekalongan	2	kali	9,500,000	DAU		2	kali	9,500,000
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan PAK tenaga fungsional yang disusun	Pekalongan	2	laporan	1,000,000	DAU		2	laporan	2,000,000
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri	Pekalongan	2	kali	30,000,000	DAU		2	kali	50,000,000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Pekalongan	100	persen	181,172,000	DAU		100	persen	267,000,000
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pekalongan	12	bulan	2,500,000	DAU		12	bulan	3,000,000
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Pekalongan	12	bulan	24,297,000	DAU		12	bulan	28,000,000
		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Pekalongan	25	Unit		DAU			Unit	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Pekalongan	12	bulan	7,000,000	DAU		12	bulan	10,000,000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Pekalongan	11	bulan	32,000,000	DAU		11	bulan	40,000,000
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pekalongan	12	bulan	12,875,000	DAU		12	bulan	13,000,000
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Pekalongan	12	bulan	2,500,000	DAU		12	bulan	3,000,000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Pekalongan	150	orang/kali	100,000,000	DAU		150	orang/kali	170,000,000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pekalongan	100	persen	58,425,000	DAU		100	persen	71,000,000
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Pekalongan	12	bulan	3,500,000	DAU		12	bulan	4,000,000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pekalongan	12	bulan	33,925,000	DAU		12	bulan	37,000,000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Pekalongan	12	bulan	21,000,000	DAU		12	bulan	30,000,000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pekalongan	100	persen	129,992,000	DAU		100	persen	160,000,000
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Pekalongan	16	unit	74,992,000	DAU		16	unit	80,000,000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara	Pekalongan	1	unit	30,000,000	DAU		1	unit	40,000,000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

	Bangunan Lainnya	rutin/berkala									
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Pekalongan	12	bulan	25,000,000	DAU		12	bulan	40,000,000
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Pekalongan	85	persen	115,316,000	DAU		85	persen	144,500,000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	Pekalongan	100	persen	101,388,000	DAU		100	persen	129,500,000
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang terbit tepat waktu	Pekalongan	64	Laporan	10,000,000	DAU		64	Laporan	15,000,000
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang terbit tepat waktu	Pekalongan	35	Laporan	10,000,000	DAU		35	Laporan	15,000,000
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang terbit tepat waktu	Pekalongan	99	laporan	10,000,000	DAU		99	laporan	20,000,000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan yang terbit tepat waktu	Pekalongan	40	laporan	10,000,000	DAU		40	laporan	15,000,000
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Pekalongan	2	laporan	8,888,000	DAU		2	laporan	9,500,000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pekalongan	7	laporan	52,500,000	DAU		7	laporan	55,000,000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	Pekalongan	100	persen	13,928,000	DAU		100	persen	15,000,000
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Pekalongan	5	Laporan	6,000,000	DAU		5	Laporan	6,000,000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit tepat waktu	Pekalongan	5	Laporan	7,928,000	DAU		5	Laporan	9,000,000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	Pekalongan	3	poin	342,677,000	DAU		3	poin	363,000,000
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Pekalongan	100	persen	31,850,000	DAU		100	persen	38,000,000
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan/Regulasi tentang Pengawasan (PKPT/Jakwas) yang disusun	Pekalongan	3	Dokumen	28,850,000	DAU		3	Dokumen	35,000,000
		Jumlah Dokumen Peraturan/Pedoman/SOP tentang peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun	Pekalongan	1	laporan		DAU		1	laporan	
		Jumlah Laporan Dokumen RAD PPK yang disusun	Pekalongan	1	laporan		DAU		1	laporan	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan yang disusun	Pekalongan	2	laporan		DAU		2	laporan	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pekalongan	4	laporan	3,000,000	DAU		4	laporan	3,000,000
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan	Pekalongan	100	persen	310,827,000	DAU		100	persen	325,000,000
6.01.03.2.01.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pekalongan	31	opd	30,000,000	DAU		31	opd	35,000,000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023

6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Pekalongan	10	laporan	25,000,000	DAU		10	laporan	30,000,000
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen LHKASN	Pekalongan	2500	Dokumen	128,237,000	DAU		2500	Dokumen	130,000,000
		Jumlah Dokumen LHKPN ASN	Pekalongan	500	Dokumen		DAU		500	Dokumen	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pekalongan	8	Laporan		DAU		8	Laporan	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi penegakan integritas yang disusun	Pekalongan	4	Laporan	127,590,000	DAU		4	Laporan	130,000,000



BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah kota Pekalongan

Rencana Kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan dan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Pekalongan. Plafon anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan untuk tahun 2023 sejumlah Rp. 5.884.152.000,- (Lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana table berikut :

Kode OPD / Kode Bidang Urusan / Kode Program / Kode Kegiatan / Kode Sub Kegiatan	Nama OPD / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target	Satuan	Kebutuhan Pagu	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat						
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					5,884,152,000	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Pekalongan	100	persen	5,426,159,000	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pekalongan	100	persen	16,000,000	DAU
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	Pekalongan	2	dokumen	2,500,000	DAU
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Pekalongan	2	dokumen	1,500,000	DAU
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Pekalongan	12	bulan	12,000,000	DAU
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	Pekalongan	4	dokumen		DAU



		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	Pekalongan	2	dokumen		DAU
		Jumlah Dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	Pekalongan	5	dokumen		DAU
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Pekalongan	100	persen	5,000,070,000	DAU
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pekalongan	12	bulan	4,965,570,000	DAU
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Pekalongan	12	bulan	33,000,000	DAU
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Pekalongan	1	dokumen	1,500,000	DAU
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pekalongan	100	persen	40,500,000	DAU
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	Pekalongan	2	kali	9,500,000	DAU
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan PAK tenaga fungsional yang disusun	Pekalongan	2	laporan	1,000,000	DAU
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri	Pekalongan	2	kali	30,000,000	DAU
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Pekalongan	100	persen	181,172,000	DAU
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pekalongan	12	bulan	2,500,000	DAU
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Pekalongan	12	bulan	24,297,000	DAU
		jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Pekalongan	25	Unit		DAU
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Pekalongan	12	bulan	7,000,000	DAU
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Pekalongan	11	bulan	32,000,000	DAU
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pekalongan	12	bulan	12,875,000	DAU
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Pekalongan	12	bulan	2,500,000	DAU
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Pekalongan	150	orang/kali	100,000,000	DAU
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pekalongan	100	persen	58,425,000	DAU
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Pekalongan	12	bulan	3,500,000	DAU
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pekalongan	12	bulan	33,925,000	DAU



6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Pekalongan	12	bulan	21,000,000	DAU
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pekalongan	100	persen	129,992,000	DAU
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	Pekalongan	16	unit	74,992,000	DAU
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Pekalongan	1	unit	30,000,000	DAU
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Pekalongan	12	bulan	25,000,000	DAU
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Pekalongan	85	persen	115,316,000	DAU
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	Pekalongan	100	persen	101,388,000	DAU
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang terbit tepat waktu	Pekalongan	64	Laporan	10,000,000	DAU
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang terbit tepat waktu	Pekalongan	35	Laporan	10,000,000	DAU
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja yang terbit tepat waktu	Pekalongan	99	laporan	10,000,000	DAU
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan yang terbit tepat waktu	Pekalongan	40	laporan	10,000,000	DAU
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	Pekalongan	2	laporan	8,888,000	DAU
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pekalongan	7	laporan	52,500,000	DAU
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	Pekalongan	100	persen	13,928,000	DAU
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Pekalongan	5	Laporan	6,000,000	DAU
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terbit tepat waktu	Pekalongan	5	Laporan	7,928,000	DAU
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	Pekalongan	3	poin	342,677,000	DAU



6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Pekalongan	100	persen	31,850,000	DAU
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan/Regulasi tentang Pengawasan (PKPT/Jakwas) yang disusun	Pekalongan	3	Dokumen	28,850,000	DAU
		Jumlah Dokumen Peraturan/Pedoman/SOP tentang peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun	Pekalongan	1	laporan		DAU
		Jumlah Laporan Dokumen RAD PPK yang disusun	Pekalongan	1	laporan		DAU
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan yang disusun	Pekalongan	2	laporan		DAU
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pekalongan	4	laporan	3,000,000	DAU
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan	Pekalongan	100	persen	310,827,000	DAU
6.01.03.2.01.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pekalongan	31	opd	30,000,000	DAU
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan pendampingan asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Pekalongan	10	laporan	25,000,000	DAU
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen LHKASN	Pekalongan	2500	Dokumen	128,237,000	DAU
		Jumlah Dokumen LHKPN ASN	Pekalongan	500	Dokumen		DAU
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pekalongan	8	Laporan		DAU
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi penegakan integritas yang disusun	Pekalongan	4	Laporan	127,590,000	DAU



BAB 5

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat Daerah.

Selanjutnya Inspektorat Daerah Kota Pekalongan sebagai pemilik fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi resiko pada perangkat daerah dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan.

Untuk itu diperlukan rencana tindak lanjut terhadap beberapa hal tersebut yang telah direncanakan yaitu :

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan – kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan dan rekomendasi.
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan" BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan/ audit kinerja dan pemeriksaan operasional serta



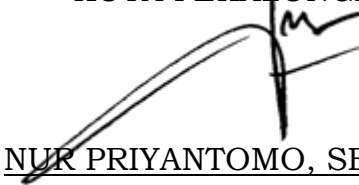
manajemen risiko terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

3. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan pemenuhan dokumen MCP.
4. Membuka layanan klinik konsultasi dan pemberian advisory terhadap OPD di Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Bekerjasama dengan KPK-RI dan Badan Statistik dalam Rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).
6. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, Sarana dan Prasarana dalam

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada tahun 2023 yang disesuaikan dengan RKPD Tahun 2023. Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang telah disusun dapat dimplementasikan dalam kegiatan pengawasan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja dan pendanaan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2023 rangka mendukung tugas-tugas di bidang pengawasan.

Pekalongan, Juli 2022

INSPEKTUR DAERAH
KOTA PEKALONGAN


NUR PRIYANTOMO, SE., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196903101996031002



RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023